



PEMERINTAH
KABUPATEN
KEPULAUAN
ANAMBAS



Tahun 2025

LKJIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



**Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kepulauan Anambas**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 tepat pada waktunya. LKjIP ini disusun dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor Perikanan, Pertanian dan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPPP ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di DPPP tahun berikutnya. Karena didalamnya terdapat kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas di Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini untuk itu diharapkan saran dari semua pihak untuk penyempurnaannya. Atas perhatian serta peran serta pihak terkait dalam penyusunan LKjIP ini kami ucapkan terima kasih.

Tarempa, Februari 2026

**Pt. KEPALA DINAS PERIKANAN
PERTANIAN DAN PANGAN,**



Arcan Iskandar, S.Pi.

Pembina/ IV.a

NIP. 197808172009031003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	5
3. Isu Strategis	8
4. Landasan Hukum	9
5. Sistematika Penyusunan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	11
2. Indikator Kinerja Utama	14
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	18
2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
BAB IV PENUTUP	
1. Simpulan	36



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perikanan dan Pangan (DP3) Kab. Kep. Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DP3 Kab. Kep. Anambas Tahun T.A 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



a. Gambaran Umum Dinas

Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan. mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan, Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Jumlah pegawai Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan 16 Desember 2025 adalah 157 orang yang tersebar di Dinas Perikanan Pertanian Pangan, UPT Perbenihan Ikan, Wilayah Kerja di Kecamatan, UPT Kesehatan Hewan, UPT Balai Benih Pertanian Terpadu, Balai Penyuluhan di Kecamatan. Jumlah pegawai terdiri dari Pria dan Wanita, dengan jumlah Pria 100 Orang dan Wanita 57 Orang.

Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan bahwa ASN (PNS dan PPPK) terbanyak terdapat di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan sebanyak 75 orang dan yang paling sedikit di BPP Kecamatan Siantan Selatan dan Wilayah Kerja Kecamatan Siantang Tengah. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, jumlah ASN lelaki lebih banyak yakni 100 orang (63,69%) dari pada perempuan yang sebanyak 57 orang (36,31%). Data jumlah ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Bertugas Tahun 2025

No	UNIT KERJA	PNS DAN PPPK		PNS		PPPK	
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
1	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN	48	27	18	13	30	14
2	UPT PERBENIHAN IKAN	12	7	4	0	8	7
3	WILAYAH KERJA KECAMATAN SIANTAN TENGAH	1	1	1	1	0	0
4	WILAYAH KERJA KECAMATAN JEMAJA	2	6	1	0	1	6
5	WILAYAH KERJA KECAMATAN JEMAJA TIMUR	5	3	0	0	5	3
6	WILAYAH KERJA KECAMATAN PALMATAK	2	2	1	0	1	2
7	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	9	4	2	2	7	2



DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

No	UNIT KERJA	PNS DAN PPPK		PNS		PPPK	
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
8	UPT BALAI BENIH PERTANIAN TERPADU	16	5	4	0	12	5
9	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN SIANTAN SELATAN	2	0	2	0	0	0
10	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PALMATAK	3	2	1	1	2	1
	JUMLAH	100	57				

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan KKA Tahun 2025

Tabel 1.2. Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Berdasarkan Golongan dan Tingkat Eselon Tahun 2025

No	UNIT KERJA	GOLONGAN							JUM LAH	TINGKAT ESELON					NON ESE LON	JUM LAH
		IV	III	II	IX	VII	V	I		II .b	III. a	III. b	IV. a	IV. b		
1	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN	2	28	1	31	0	12	1	75	1	1	4	1	0	68	75
2	UPT PERBENIHAN IKAN	0	3	1	8	0	6	1	19	0	0	0	1	1	17	19
3	WILAYAH KERJA KECAMATAN SIANTAN TENGAH	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2
6	WILAYAH KERJA KECAMATAN JEMAJA	0	0	1	3	1	3	0	8	0	0	0	0	0	8	8
7	WILAYAH KERJA KECAMATAN JEMAJA TIMUR	0	0	0	3	0	4	1	8	0	0	0	0	0	8	8
8	WILAYAH KERJA KECAMATAN PALMATAK	0	1	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	4	4
9	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	0	4	0	0	0	9	0	13	0	0	0	1	1	11	13
10	UPT BALAI BENIH PERTANIAN TERPADU	0	3	1	9	0	8	0	21	0	0	0	1	1	19	21
11	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2



DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

	KECAMATAN SIANTAN SELATAN															
12	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PALMATAK	0	2	0	2	0	1	0	5	0	0	0	0	0	5	5

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan KKA Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dari 157 orang ASN pada umumnya banyak yang berada di DPPP yaitu golongan IX merupakan PPPK sebanyak 31 orang (70,17%), yang kedua merupakan golongan III yaitu PNS sebanyak 28 orang (17,83%), ketiga yaitu golongan V sebanyak 12 orang (7,64%), dan paling sedikit ditempati oleh golongan II sebanyak 1 orang dan golongan I sebanyak 1 orang (0,63%).

Tabel 1.3. Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN								JUMLAH
		S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	SMP	SD	
1	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN	3	55	2	0	1	13	0	1	75
2	UPT PERBENIHAN IKAN	0	9	1	0	0	8	1	0	19
3	WILAYAH KERJA KECAMATAN SIANTAN TENGAH	0	1	0	0	0	1	0	0	2
4	WILAYAH KERJA KECAMATAN JEMAJA	0	3	0	1	0	4	0	0	8
5	WILAYAH KERJA KECAMATAN JEMAJA TIMUR	0	3	0	0	0	4	1	0	8
6	WILAYAH KERJA KECAMATAN PALMATAK	0	0	0	0	0	4	0	0	4
7	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	0	2	0	1	0	10	0	0	13
8	UPT BALAI BENIH PERTANIAN TERPADU	0	10	1	0	0	10	0	0	21
9	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN SIANTAN SELATAN	0	2	0	0	0	0	0	0	2
10	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PALMATAK	0	4	0	0	0	1	0	0	5

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan KKA Tahun 2025



Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 157 orang ASN pada umumnya memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 89 orang (56,89%), disusul pendidikan SLTA sebanyak 55 orang (35,03%), dan paling sedikit pendidikan SD sebanyak 1 orang (0,001%).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan, pertanian dan ketahanan pangan;
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e) Pengelolaan barang milik Daerah;
- f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu sekretariat dan 5 (lima) bidang yakni sebagai berikut :

1. Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan. Susunan organisasi sekretariat terdiri dari sekretaris dinas, kepala sub bagian umum dan kepegawaian, jabatan fungsional keuangan dan jabatan fungsional program.
2. Bidang Perikanan Tangkap memiliki tugas yakni melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan nelayan. Susunan organisasi bidang pemberdayaan nelayan terdiri dari seksi peningkatan pemberdayaan manusia nelayan kecil, seksi kemitraan dan iptek nelayan kecil dan seksi pembinaan kelembagaan nelayan kecil.



3. Bidang Peningkatan Daya Saing Hasil Perikanan memiliki tugas yakni perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan dan kelayakan usaha.
4. Bidang Perikanan Budidaya memiliki tugas yakni perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembudidayaan ikan. Susunan organisasi bidang pembudidayaan ikan terdiri dari seksi pemberdayaan pembudidayaan ikan, seksi pakan, kesehatan ikan dan lingkungan dan seksi pembenihan dan pembesaran ikan.
5. Bidang Pertanian memiliki tugas yakni perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pertanian. Susunan organisasi bidang pertanian terdiri dari seksi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, seksi pengembangan peternakan dan seksi pengembangan perkebunan.
6. Bidang Ketahanan Pangan memiliki tugas yakni perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketahanan pangan. Susunan organisasi bidang ketahanan pangan terdiri dari seksi ketersediaan dan kerawanan pangan, seksi konsumsi dan keanekaragaman pangan dan seksi kelembagaan dan penyuluhan.

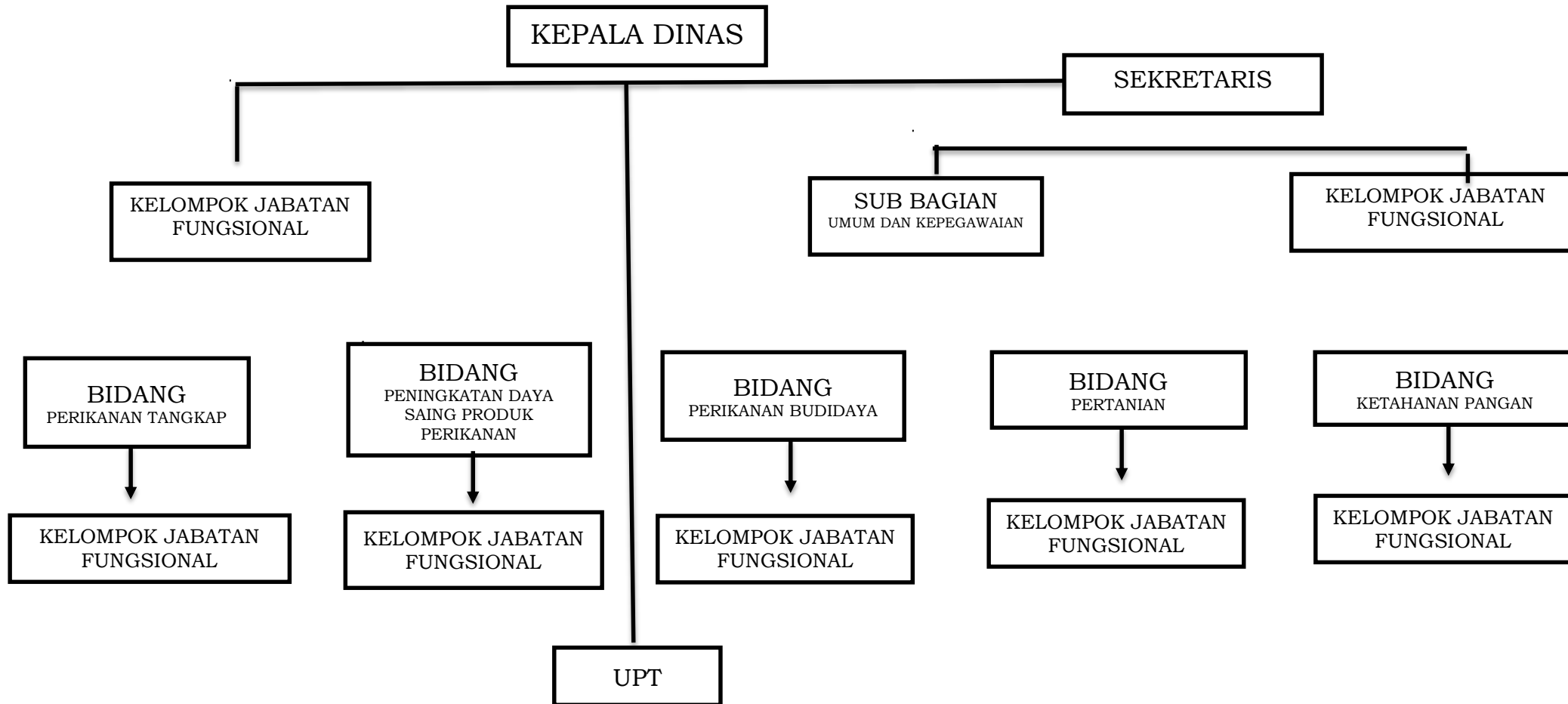
Susunan Organisasi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan terdiri dari: Sekretariat; - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Perikanan Tangkap; Bidang Perikanan Budidaya; Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan; Bidang Pertanian; Bidang Ketahanan Pangan; Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam struktur organisasi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Adapun UPT Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud meliputi : UPT Pusat Kesehatan Hewan ; UPT Perbenihan Ikan; UPT Balai Benih Pertanian Terpadu; Balai Penyuluhan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dipimpin oleh kepala dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas





3. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dan memiliki urgensi untuk dicarikan solusinya. Manakala hal tersebut tidak terpecahkan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Hal yang menjadi dasar ditetapkannya isu strategis dan menjadi fokus perhatian bagi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah pengembangan potensi dan kondisi sejalan dengan perkembangan serta dinamika kehidupan masyarakat. di bawah ini akan dikemukakan berbagai isu strategis terkait dengan pembangunan sektor Perikanan dan Pertanian di Kepulauan Anambas sebagai berikut:

Tabel 3.1 Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	Perlindungan terhadap laut	Penurunan tingkat kemiskinan	Penurunan jumlah sampah di laut	Peningkatan kontribusi PDRB sektor perikanan terhadap PDRB daerah dan nasional
Jumlah Pembudidaya Ikan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya			Pemberdayaan masyarakat		
Olahan produk perikanan	Sulitnya akses pemasaran	Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh industri kecil	Pengembangan produk perikanan di skala retail modern	Memperkuat dan mengembangkan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi	Peningkatan nilai produk perikanan	Peningkatan daya saing dan mutu produk perikanan
Pertanian tanaman pangan dan perkebunan	Kurangnya sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan perkebunan	potensi pengembangan pertanian pangan seluas 1,203 Ha pada ruang kawasan tanaman pangan	Pemenuhan kebutuhan lahan pertanian	Peningkatan produktivitas lahan pertanian	Pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal	Pengembangan komoditas unggulan yang berpeluang pasar tinggi



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Peternakan hewan ruminansia dan unggas	Kurangnya sarana dan prasarana peternakan	Meningkatkan pertanian berkelanjutan		Peningkatan produksi daging dan susu sapi		Peningkatan ketersediaan lapangan kerja sektor Pertanian;
Pengelolaan ketahanan pangan	Rendahnya indeks ketahanan pangan	Kapasitas daya dukung penyedia pangan tergolong tingkat sedang dengan persentase 51.06%	Penurunan krisis pangan global	Penguatan kemandirian pangan	Diversifikasi sumber pangan lokal	Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi di Kabupaten Kepulauan Anambas

4. Landasan Hukum

LKjIP Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;



8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.

5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah:

BAB I Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi perangkat daerah, dasar hukum, dan sistematika.

BAB II Perencanaan Kinerja

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi perangkat daerah, dasar hukum, dan sistematika.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup

Meliputi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 01 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Energi Baru Anambas Maju. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan membantu kepala daerah melaksanakan visi dan misinya. Visi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 mengacu pada visi Kepala Daerah yaitu:

**“KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERDAYA SAING, INOVATIF,
AGAMIS, UNGGUL DI BIDANG MARITIM MENUJU
MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA”**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan 2 Misi sebagai berikut:

1. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata;
2. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;

a. Tujuan dan Sasaran

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029:



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan berbasis maritim	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	4,64	4,91	5,19	5,46	5,74	6,01
			Nilai Tukar Nelayan	106	106,9	107,7	108,4	108,7	109
2	Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	1,69	1,70	1,71	1,72	1,73	1,74
			Nilai Tukar Petani	100	100,7	101	101,3	101,4	101,6
			Indeks Ketahanan Pangan	55,4	55,51	55,65	55,72	55,83	55,91
3	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas	Nilai AKIP (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Nilai SAKIP (Angka)	78,1	78,4	78,7	79	79,5	79,8

Sumber : Renstra DPP 2025-2029



2. Indikator Kinerja Utama

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan
2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani
	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan 2025-2029

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Renstra DPPP Tahun 2025-2029, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala DPPP Kab. Kep. Anambas dengan Bupati Kep. Anambas. Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	106
2.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	100



DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	55,4
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	78,1



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tabel Kategori Predikat Penilaian AKIP

No	Predikat	Interpretasi
1.	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	>80-90	Memuaskan
3.	>70-80	Sangat Baik
4.	>60-70	Baik
5.	>50-60	Cukup (Memadai)
6.	>30-50	Kurang
7.	>0-30	Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



a. Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

Capaian Kinerja Tujuan Strategis DPPP Tahun 2025 berikut dengan kriterianya tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan Strategis Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan berbasis maritim	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	4,64	4,64*	100
2	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	1,69	1,69*	100
3	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	BB	A	100

Catatan : * Angka Sementara

Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan memiliki 3 (tiga) tujuan Strategis dan targetnya masing-masing. Dalam pelaksanaan DPPP membantu kepala daerah mewujudkan visi dan misi. Semua indikator tujuan pada tahun 2025 memiliki capaian 100%. Komitmen yang baik dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung kontribusi sektor perikanan dan pertanian, dan peningkatan ketahanan pangan serta perbaikan system pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

b. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPPP Tahun 2025 yang juga sekaligus menjawab capaian Indikator Kinerja Utama DPPP Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.3. Dapat dilihat bahwa capaian kinerja DPPP memiliki realisasi diatas target dengan kata lain capaian kinerja dengan interpretasi sangat memuaskan. Rincian realisasi capaian kinerja sasaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Interpretasi
1	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan berbasis maritim	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	106	106*	>100	Sangat Memuaskan
2	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	100	104,64	>100	Sangat Memuaskan
3		Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	55,4	66,32	>100	Sangat Memuaskan
4	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	78,1	83,35	>100	Sangat Memuaskan

Catatan : * Angka Sementara

1. Berdasarkan Tabel 3.3 Capaian Kinerja DPPP secara umum memiliki realisasi melebihi target dengan interpretasi sangat memuaskan , dengan kata lain kinerja DPPP memiliki komitmen kinerja yang baik dalam memenuhi kinerja yang telah dibuat;
2. Indikator Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Petani merupakan indikator kinerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani. Alokasi anggaran yang ditujukan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani juga diperuntukkan untuk mencapai target tersebut; Harapannya kesejahteraan nelayan dan petani dapat ditingkatkan melalui program dan kegiatan yang disediakan;
3. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP Kab.Kepulauan Anambas Tahun 2025 66,32. Nilai IKP ini lebih besar dari tahun sebelumnya bernilai 55,34. Hal ini menunjukkan bahwa



ketahanan pangan Kab.Kep. Anambas lebih baik dari sebelumnya;

4. Indikator Nilai SAKIP merupakan indikator kinerja dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintah yang berkualitas. Nilai SAKIP DPPP tahun memiliki nilai 83,35 dengan interpretasi sangat memuaskan. Program penunjang urusan pemerintah daerah merupakan salah satu program yang mendukung terwujudnya realisasi Nilai SAKIP DPPP.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan renstra

Data capaian kinerja sasaran Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya terhadap target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024		Tahun 2025		Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	102	102	106	106*	109
2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	109,5	104,80	100	104,64	101,6
3	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	-	55,34	55,4	66,32	55,91
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	70,5	83,35	78,1	83,35*	79,8

Catatan : * Angka Sementara

Berdasarkan Tabel 3.4 Capaian kinerja sasaran tahun 2024 dan 2025 memiliki realisasi yang melibihi target tahunan, namun terhadap target renstra baru mencapai 97,24%. Sasaran ini dapat menjadi acuan dalam penentuan kesejahteraan nelayan. Alokasi



anggaran yang diperuntukan untuk mencapai target tahunan sasaran ini terus dilakukan agar capaian kinerja dapat mencapai target.

Nilai tukar petani tahun 2024 dan 2025 juga melebihi target pertahun dan realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target renstra yaitu 101,6. Nilai tukar petani (NTP) Desember 2025 dalam perkembangan nasional sebesar 125,35. Nilai Tukar Nelayan (NTN) memiliki realisasi pada tahun 2025 telah mencapai target akhir renstra dengan kata lain realisasi 100%. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Nasional memiliki realisasi pada tahun 2025 sebesar 103,86.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dengan realisasi yang juga melebihi target (dapat dilihat pada Tabel 3.4). Sasaran ini telah mencapai target akhir renstra yaitu 66,32 dengan kata lain telah mencapai 100%. Sasaran ke empat yaitu Nilai SAKIP (Angka) memiliki target renstra yaitu 79,8. Sasaran ini telah mencapai target akhir renstra dengan kata lain realisasi 100% dengan nilai SAKIP pada tahun 2025 83,35. Keberhasilan dalam mencapai target nilai SAKIP ini tidak terlepas dari semua dukungan dari pihak terkait dan komitmen dalam perbaikan akuntabilitas kinerja DPPP.

2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Data realisasi Perjanjian Kinerja DPPP Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Capaian Perjanjian Kinerja DPPP Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Ketercapaian	Interprestasi
1	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	106	106*	>100	Sangat Memuaskan
2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	100	104,64	>100	Sangat Memuaskan
3	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	55,4	66,32	>100	Sangat Memuaskan
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	78,1	83,35	>100	Sangat Memuaskan

Catatan : * Angka Sementara



1. Berdasarkan Tabel 3.5 Capaian Perjanjian kinerja DPPP secara umum memiliki interpretasi sangat memuaskan, dengan kata lain kinerja DPPP memiliki komitmen kinerja yang baik dalam memenuhi perjanjian kinerja yang telah dibuat;
2. Indikator Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Petani merupakan indikator kinerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani. Alokasi anggaran yang ditujukan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani juga diperuntukkan untuk mencapai target tersebut. Harapannya kesejahteraan nelayan dan petani dapat ditingkatkan melalui program dan kegiatan yang disediakan;
3. Indikator Nilai SAKIP merupakan indikator kinerja dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintah yang berkualitas. Nilai SAKIP DPPP tahun memiliki nilai 83,35 dengan interpretasi sangat memuaskan. Program penunjang urusan pemerintah daerah merupakan salah satu program yang mendukung terwujudnya realisasi Nilai SAKIP DPPP;
4. Tabel analisis kegiatan penunjang kinerja dapat juga dilihat pada Tabel 3.6.



Tabel 3.6 Tabel Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran dalam menunjang Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama (IKU)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak	Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Menunjang	Rp.4.700.000,00	Rp.4.700.000,00	100	1
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Kelembagaannya	Menunjang	Rp.83.213.000,00	Rp.68.213.000	81,97	0,81
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Tidak Menunjang	Rp.0,00	Rp.68.213.000	81,97	0,81
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Menunjang	Rp.20.400.000,00	Rp.20.400.000,00	100	1
			Penyediaan Prasarana	Jumlah Prasarana Pembudidayaan	Tidak Menunjang	Rp.20.400.000,00	Rp.20.400.000,00	100	1



No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama (IKU)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak	Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
			Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Menunjang	Rp.0,00	Rp.0,00	0	-
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Tidak Menunjang	Rp.0,00	Rp.0,00	0	-
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	Tidak Menunjang	Rp.2.150.000,00	Rp.2.150.000,00	100	1



N o	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama (IKU)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak	Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
			dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi					
2	Meningka tnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Tidak Menunjang	Rp.35.927,880,00	Rp.29.634.410,00	82,48	0,82
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kot a	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Menunjang	Rp.0,00	Rp.0,00	0	-
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Menunjang	Rp.0,00	Rp.0,00	0	-
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus	Tidak Menunjang	Rp.0,00	Rp.0,00	0	-



No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama (IKU)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak	Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
			Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota					
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tidak Menunjang	Rp.24.998.500,00	Rp.0	0	-
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Menunjang	Rp.0,00	Rp.0,00	0	-
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Menunjang	Rp.3000.000,00	Rp.3000.000,00	100	1
			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh yang diberi peningkatan kapasitas	Menunjang	Rp.22.800.000,00	Rp.22.800.000,00	100	1



No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama (IKU)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak	Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
3	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Menunjang	Rp.3.179.500,00	Rp.3.175.000,00	99,86	0,99
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menunjang	Rp.0,00	Rp.0,00	0	-
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Menunjang	Rp.400.000,00	Rp.400.000,00	100	1



No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama (IKU)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak	Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tidak Menunjang	Rp.11.316.428.765.7,00	Rp.9.568.789.870,00	84,56	0,84
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tidak Menunjang	Rp.151.480.000,00	Rp.147.480.000,00	97,36	0,97
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tidak Menunjang	Rp.54.968.000,00	Rp.45.928.000	83,55	0,83
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tidak Menunjang	Rp.0,00	Rp.0,00	0	-
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tidak Menunjang	Rp.10.000.000,00	Rp.9.151.000,00	91,51	0,91
			Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik	Tidak Menunjang	Rp.10.247.384,00	Rp.7.173.000,00	70	0,7



DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama (IKU)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak	Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
			Kantor	Kantor yang Disediakan					
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tidak Menunjang	Rp.10.000.000,00	Rp.7.043.500,00	70,44	0,7
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tidak Menunjang	Rp.0,00	Rp.0,00	0	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tidak Menunjang	Rp.111.545.028,00	Rp.111.481.762,00	99,94	0,99
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tidak Menunjang	Rp.0,00	Rp.0,00	0	-
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tidak Menunjang	Rp.200.000,00	Rp.200.000,00	100	1
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tidak Menunjang	Rp.342.876.095,00	Rp.341.933.165,00	99,72	0,99
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tidak Menunjang	Rp.41.612.000,00	Rp.31.526.620,00	75,76	0,75
			Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Tidak Menunjang	Rp.50.516.445,00	Rp.27.268.000,00	53,98	0,53



DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama (IKU)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak	Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tidak Menunjang	Rp.279.931.791,00	Rp.279.931.791,00	100	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tidak Menunjang	Rp.0,00	Rp.0,00	0	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tidak Menunjang	Rp.0,00	Rp.0,00	0	-



No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama (IKU)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak	Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tidak Menunjang	Rp.0,00	Rp.0,00		

Program dan kegiatan pada Tahun 2025 memiliki alokasi anggaran yang diperuntukan untuk kegiatan rutinitas perkantoran dan pembayaran hutang tahun sebelumnya. Pada dasarnya tidak menjadi halangan dalam mencapai capaian kinerja.



3. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas DPPP untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis, memerlukan dukungan anggaran melalui belanja yang memadai. Pada tahun 2025, DPPP mendapat alokasi anggaran belanja sebesar **Rp.12.600.974.389,-** yang direalisasikan sebesar **Rp.10.752.779.118,-** atau sebesar **85,33%**. Realisasi fisik anggaran sebesar **94,51%**.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
	Rp.	Rp.	%	%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 3.179.500	Rp 3.175.000	99,86	100
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 3.179.500	Rp 3.175.000	99,86	100
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 3.179.500	Rp 3.175.000	99,86	100
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp -	Rp -	-	-
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	-	-
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan dalam 1 (satu)	Rp -	Rp -	-	-



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
	Rp.	Rp.	%	%
Daerah Kabupaten/Kota				
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 400.000	Rp 400.000	100	100
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 400.000	Rp 400.000	100	100
Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 400.000	Rp 400.000	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 12.379.805.509	Rp 10.577.906.708	84,73	91,97
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 11.467.908.765	Rp 9.716.269.870	84,73	91,97
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 11.316.428.765	Rp 9.568.789.870	84,56	86,45
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 151.480.000	Rp 147.480.000	97,36	97,5
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 54.968.000	Rp 45.928.000	83,55	91,67
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 54.968.000	Rp 45.928.000	83,55	91,67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
	Rp.	Rp.	%	%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 141.792.413	Rp 134.849.262	95,1	95,46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1	Rp -	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 10.000.000	Rp 9.151.000	91,51	94,33
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 10.247.384	Rp 7.173.000	70	91,67
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Rp 10.000.000	Rp 7.043.500	70,44	95,83
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp -	Rp -	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 111.545.028	Rp 111.481.762	99,94	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 343.076.095	Rp 342.133.165	99,72	99,93
Pengadaan Mabel	Rp -	Rp -	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 200.000	Rp 200.000	100	100



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
	Rp.	Rp.	%	%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 342.876.095	Rp 341.933.165	99,72	99,93
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Rp 372.060.236	Rp 338.726.411	91,04	94,25
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 41.612.000	Rp 31.526.620	75,76	84
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 50.516.445	Rp 27.268.000	53,98	70,83
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 279.931.791	Rp 279.931.791	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp -	Rp -	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp -	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp -	Rp -	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp -	Rp -	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp -	Rp -	0	0



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
	Rp.	Rp.	%	%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 87.913.000	Rp 72.913.000	82,94	91
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 87.913.000	Rp 72.913.000	82,94	91
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.	Rp 4.700.000	Rp 4.700.000	100	100
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Rp 83.213.000	Rp 68.213.000	81,97	82
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 40.800.000	Rp 40.800.000	100	100
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp 40.800.000	Rp 40.800.000	100	100
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.400.000	Rp 20.400.000	100	100
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Rp 20.400.000	Rp 20.400.000	100	100
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	0
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 2.150.000	Rp 2.150.000	100	100
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil	Rp -	Rp -	0	0



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
	Rp.	Rp.	%	%
Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0	0
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp -	Rp -	0	0
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp -	Rp -	0	0
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.150.000	Rp 2.150.000	100	100
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.150.000	Rp 2.150.000	100	100
PROGRAM PENYEDIAAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 35.927.880	Rp 29.634.410	82,48	83,33



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
	Rp.	Rp.	%	%
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 35.927.880	Rp 29.634.410	82,48	83,33
Peningkatan Kualitas SDG Hewan atau Tanaman.	Rp 35.927.880	Rp 29.634.410	82,48	83,33
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PRORGAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 24.998.500	Rp -	0	0
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 24.998.500	Rp -	0	0



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
	Rp.	Rp.	%	%
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp 24.998.500	Rp -	0	0
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 25.800.000	Rp 25.800.000	100	100
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp 25.800.000	Rp 25.800.000	100	100
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100	100
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian (DAK NON FISIK)	Rp 22.800.000	Rp 22.800.000	100	100
Jumlah	Rp 12.600.974.389	Rp 10.752.779.118	85,33	94,51

3.1.1 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Nasional

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

2. Prestasi Tingkat Kabupaten

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	Menuju Informatif dalam Implementasi	Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	2025



No	Prestasi	Penghargaan	Tahun
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008		



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPPP Kab. Kep. Anambas Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja DPPP Kab. Kep. Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2025 DPPP Kab. Kep. Anambas menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 3 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai hasil reviu yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran tersebut, secara umum telah dalam kategori sangat memuaskan karena sebagian besar telah sesuai target dan melampaui target. Selain itu, pada tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana DPPA Bappeda Kab. Kep. Anambas alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar **Rp.12.600.974.389,-** yang direalisasikan sebesar **Rp.10.752.779.118,-** dengan persentase sebesar **85,33%**. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar **Rp.1.848.195.271,- (14%)**. Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil DPPP Kab. Kep. Anambas. Terlepas dari keberhasilan tadi, tentunya kami terus mengharapkan dukungan



dari seluruh pihak agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal.

Tarempa, Februari 2026

**Pit. KEPALA DINAS PERIKANAN
PERTANIAN DAN PANGAN,**



Arcan Iskandar, S.Pi.

Pembina/ IV.a

NIP. 197808172009031003